

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA ALAM MINANG KABAU
BERBASIS ADAT BASANDI SARA', SARA' BASANDI KITABULLAH**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

- I. **LATAR BELAKANG** : Kegiatan Penyusunan Perda tentang Kurikulum Muatan Lokal BAM berbasis Adat Basandi Sara' Sara' Basandi Kitabullah merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya dengan judul yang sama. Pada kegiatan tahun 2018 outputnya adalah Ranperda. Sedangkan tahun 2019 outputnya adalah Perda. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan untuk menjadikan Ranperda Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan menjadi Perda Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
- II. **DASAR HUKUM** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
15. DPA Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau berbasis Adat Basandi Sara', Sara' Basandi Kitabullah Tahun Anggaran 2019.

- III. MAKSUD DAN TUJUAN :
1. Maksud
Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minang Kabau Berbasis Adat Basandi Sara' Sara' Basandi Kitabullah bertujuan untuk melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemanjuaan dan Pelestarian Kebudayaan yang di dalamnya terdapat Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minang Kabau Berbasis Adat Basandi Sara', Sara' Basandi Kitabullah
 2. Tujuan
Memberikan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan yang didalamnya terdapat Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minang Kabau berbasis Adat Basandi Sara', Sara' Basandi Kitabullah.

BAB II

PEMBAHASAN

1. JUDUL DAN TEMA KEGIATAN

JUDUL KEGIATAN : Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan yang di dalamnya terdapat Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau berbasis Adat Basandi Sara', Sara' Basandi Kitabullah

TEMA KEGIATAN : Menciptakan Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan yang berkualitas, sesuai dengan karakteristik masyarakat dan aspiratif serta tidak tumpang tindih dengan regulasi yang telah ada.

- II. **TARGET/SASA RAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Kurikulum Muatan Lokal BAMK Berbasis Adat Basandi Sara' Sara' Basandi Kitabullah adalah sebagai berikut :
- Terciptanya Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
- III **HASIL YANG DIHARAPKAN** : Hasil/produk yang akan dihasilkan dari Pekerjaan :
- a. Penyusunan Perda Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dalam kegiatan Penyusunan Perda tentang Muatan Lokal BAMK Berbasis Adat Basandi Sara' Sara' Basandi Kitabullah terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan perencanaan;
 - b. Terdapat pembahasan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan;
 - c. Terbentuknya sebuah Naskah Peraturan Daerah Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan yang di dalamnya terdapat tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minang Kabau Berbasis Adat Basandi Sara', Sara' Basandi Kitabullah yang mana Pengesahannya di tunda pada Tahun Berikutnya sesuai dengan Surata Bupati Pesisir Selatan Nomor : 180/1957/Hkm/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 Perihal Penundaan Pembahasan dan Persetujuan Bersama Ranperda.
- IV **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** : Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan yang di dalamnya terdapat Kurikulum Muatan Lokal BAMK Berbasis Adat Basandi Sara' Sara' Basandi Kitabullah dilakukan pada tiap Triwulan pada tahun 2019.
- V. **TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN** : Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :
- Tenaga teknis dalam kegiatan sebagai berikut;
- a. Tenaga Ahli di bidang pembuatan Naskah Akademik Ranperda Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk mendampingi pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Akademisi yang membidangi Kebudayaan untuk pendampingan dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

VI PELAKSANAAN : Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Adat dan Tradisi Daerah
KEGIATAAN Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan.

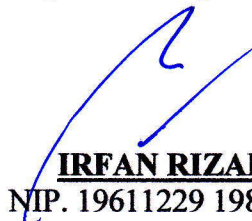
BAB III

PENUTUP

Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal BAMK Berbasis Adat Basandi Syara' Sara' Basandi Kitabullah ini berhasil dengan dukungan dan partisipasi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Peraturan Daerah ini perlu untuk melestarikan dan mempertahankan keberadaan kebudayaan daerah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Mudah-mudahan dengan penundaan Pembahasan dan Persetujuan Bersama Ranperda Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan akan mendapatkan hasil yang lebih baik demi Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan

Mengetahui
Kepala Bidang Kebudayaan



IRFAN RIZAL, S.Ip
NIP. 19611229 198303 1 005

Painan, Desember 2019
Kepala Seksi Adat dan Tradisi Daerah



SYAFNIDA, SH
NIP. 19740913 200701 2 005